

BAB I

PENDAHULUAN

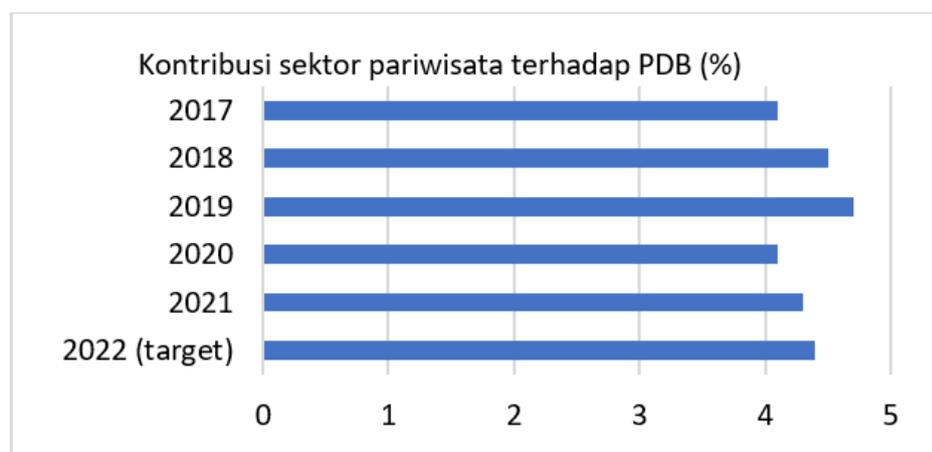
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, budaya maupun keindahan alam. Panorama alam menjadi suatu hal yang potensial untuk dikembangkan dan diandalkan pada sektor pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Pariwisata menjadi salah satu bidang unggulan negara Indonesia, berperan sebagai salah satu penghasil devisa negara terbesar. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), dengan jumlah hasil devisa yang mencapai US\$ 26 miliar, industri pariwisata Indonesia menduduki urutan kedua sebagai sektor utama penghasil devisa negara terbesar di Indonesia. Selain sebagai penghasil devisa negara, sektor pariwisata juga menjadi sektor yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan baik skala daerah maupun nasional. Pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan kaitannya dengan perekonomian dan pendapatan masyarakat di sekitar daerah wisata, melalui berbagai program maupun pelaku usaha sehingga sektor pariwisata sangat membantu pemerintah dalam penciptaan dan penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.

Dalam perkembangannya, industri pariwisata tumbuh secara cepat menjadi salah satu sektor penunjang ekonomi terbesar di seluruh dunia akibat adanya ekspansi dan diversifikasi secara berkelanjutan (Ratman, 2016). Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisatanya masing-masing dengan keunikan dan ciri khas yang beragam sebagai daya tarik. Setiap daerah dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah melalui pengembangan pariwisata yang ada pada daerahnya tersebut. Berdasarkan data *Travel & Tourism Development Index 2021 WEF* yang dikutip melalui CNBC Indonesia (2022), pariwisata Indonesia menduduki posisi ke-32 dari 117 negara dengan pariwisata terbaik di seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa pencapaian sektor pariwisata Indonesia tumbuh sangat signifikan dan wajar apabila menjadi sektor prioritas.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan data kontribusi pariwisata Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun 2017-2021:



Gambar 1. 1 Data Kontribusi Pariwisata Indonesia terhadap PDB 2017-2021

(Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Namun, adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan kelumpuhan sementara seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali sektor pariwisata. Penyebaran virus Covid-19 secara cepat tersebut didorong oleh kecepatan yang manusia gunakan untuk melintasi perbatasan negara dan benua, seperti penggunaan pesawat sebagai

transportasi yang memudahkan virus Covid-19 menyebar ke seluruh penjuru dunia. Covid-19 mempengaruhi laju aktivitas masyarakat sehari-hari karena masyarakat dituntut untuk tidak berinteraksi dengan orang lain apabila tidak ingin terjangkit virus Covid-19. Berbagai kebijakan pembatasan aktivitas dibuat oleh pemerintah di seluruh dunia, mulai dari pembatasan sektor-sektor tertentu hingga *lockdown* atau menutup diri dari akses luar yang dilakukan oleh beberapa negara tertentu.

Pemerintah Indonesia pun menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah, mengurangi kerumunan serta membuat segala macam kegiatan menjadi *work from home* atau secara *online*, yang diatur secara tegas melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kebijakan pembatasan yang dibuat ini tentu memiliki pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat. Dilansir dari (CNBC Indonesia, 2020) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa PSBB memberikan dampak yang positif untuk menekan angka positif Covid-19 agar masyarakat dapat beraktivitas seperti semula, namun di sisi lain memberikan dampak buruk yang cukup signifikan bagi perekonomian karena berbagai sektor kehidupan menjadi tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan berdampak negatif pada tingkat konsumsi serta pendapatan masyarakat.

Selain sektor ekonomi, pariwisata juga menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Akses global yang ditutup menimbulkan anjloknya jumlah wisatawan, yang kemudian berpengaruh terhadap penurunan secara signifikan perekonomian masyarakat sekitar daerah wisata. Kontribusi pariwisata terhadap PDB dan devisa negara pun merosot daripada tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata (Elistia, 2021). Penurunan sektor pariwisata akibat pandemi pun berdampak pada usaha UMKM dan lapangan kerja karena selama ini sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja (Sanaubar et al., 2017).

Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial selama beberapa waktu mengakibatkan kebosanan bagi masyarakat sehingga sebagian orang mulai mencari alternatif solusi untuk berwisata sebagai sarana hiburan. Selain itu, pembatasan sosial menjadikan masyarakat lebih familiar dengan teknologi dan sosial media dalam segala kegiatan sehari-hari sehingga cenderung mencari tempat wisata yang kekinian dan *instagrammable* untuk kebutuhan gaya hidup sosial media (Komarudin, 2020). Timbulnya rasa kebosanan masyarakat di tengah pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial tersebut menuntut pemerintah untuk sigap dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi menuju suatu keadaan dan adaptasi baru maka, seiring berjalannya waktu sebagai bentuk kesigapan pemerintah tersebut, dikeluarkan kebijakan *new normal* oleh pemerintah dalam rangka menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia yang sebelumnya

sempat mengalami kelumpuhan. Era *new normal* menjadi momentum yang paling tepat bagi dunia pariwisata untuk kembali memulihkan aktivitas dan targetnya seperti semula dan membawa angin segar bagi pemulihan industri pariwisata Indonesia (Rudiyanto & Sugiarto, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2021) yang mengungkapkan bahwa era *new normal* menjadikan pariwisata bertransformasi melalui *refresh product* yang memperhatikan keinginan serta kebutuhan para wisatawan. Upaya pemulihan pariwisata *new normal* pun dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mengategorikan fase penyelamatan pariwisata Indonesia yang terdiri dari 3 hal, yaitu tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi. Fase tanggap darurat berfokus pada kesehatan, fase pemulihan berfokus pada pembukaan pariwisata secara bertahap melalui persiapan yang matang serta fase normalisasi yang berfokus pada peningkatan minat pasar pariwisata melalui program-program baru di sekitar kawasan wisata dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Ketiga fase penyelamatan dan pemulihan pariwisata tersebut diimplementasikan melalui berbagai inovasi, kolaborasi, komunikasi, *upskilling* sumber daya manusia dan *maintenance* pariwisata (Ferdiansyah, dkk, 2020).

Berbagai macam daya tarik wisata baru bermunculan di masa *new normal* sebagai upaya untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi salah satunya, yaitu destinasi wisata Nepal Van Java. Wisata alam menjadi tren wisata baru dan alternatif solusi berwisata yang diminati oleh masyarakat setelah masa pandemi ketika mengalami kebosanan akibat adanya

pembatasan sosial (Setyaningrum, dkk, 2022). Nepal Van Java merupakan sebuah wisata alam yang berada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Nepal Van Java menyuguhkan pemandangan alam Gunung Sumbing dengan susunan rumah penduduk bertingkat berbentuk terasering dan warna-warni yang menyerupai pemukiman di kawasan pegunungan Himalaya Nepal (Ningrum dan Salim, 2021). Hal inilah yang menjadikan wisata alam ini dijuluki “Nepal Van Java”. Sebelumnya, Dusun Butuh yang merupakan lokasi Nepal Van Java bukan merupakan sebuah tempat wisata alam, melainkan salah satu desa miskin di Kabupaten Magelang yang didominasi oleh daerah pertanian berupa tanaman sayuran seperti kol, kentang, dan wortel. Dusun Butuh juga merupakan pintu pendakian Gunung Sumbing.

Nepal Van Java mulai menarik perhatian publik pada akhir tahun 2020 sejak keindahan alamnya viral di media sosial sehingga mulai mendatangkan banyak pengunjung baik lokal, nasional maupun internasional. Konsep utama yang ditawarkan oleh wisata ini, yaitu keindahan pemandangan lereng pegunungan, spot foto dengan latar belakang suasana Nepal serta keindahan *sunrise* di pagi hari. Wisata alam menjadi alternatif pilihan wisata masyarakat di tengah kebosanan akibat kebijakan pembatasan sosial (Setyaningrum, dkk, 2022). Tingkat kunjungan wisatawan di Nepal Van Java cukup tinggi, yaitu berkisar di angka 150 pengunjung pada hari biasa dan 1500 pengunjung saat akhir pekan (Aldora et al., 2021).

Berikut adalah grafik yang menunjukkan naik turunnya angka kunjungan wisatawan di Nepal Van Java pada tahun 2020 dan 2021:



Gambar 1. 2 Data Kunjungan Wisatawan Nepal Van Java tahun 2020-2021
(Sumber: Pokdarwis Dusun Butuh, 2021)

Kunjungan wisatawan mulai meningkat pada akhir tahun 2020 sejak kepopulerannya di media sosial sehingga mencapai angka tertinggi kunjungan pada bulan September 2020 yang mencapai 30.042 pengunjung. Rata-rata pengunjung Nepal Van Java setiap bulannya berada di atas 10 ribu pengunjung, namun adanya PPKM Jawa-Bali yang diterapkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2021 menyebabkan jumlah wisatawan berkurang secara drastis, yaitu hanya berkisar di angka seribu pengunjung setiap bulannya dengan angka paling kecil pada bulan Agustus 2021, yaitu sebanyak 1080 pengunjung.

Nepal Van Java sebagai tren wisata baru yang muncul di masa pandemi, belum dapat melakukan pengembangan pariwisata secara maksimal karena berdasarkan data Bappeda (2022), Dusun Butuh merupakan salah satu dari 25 desa di Kabupaten

Magelang yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem sehingga memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta sumber daya modal yang dimiliki. Sebagian besar masyarakat sebagai pengelola pun masih mengalami *culture shock* akibat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam kegiatan sehari-harinya, yaitu adanya peralihan dari sektor pertanian menjadi sektor pariwisata. Hal tersebut menjadi sebuah urgensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat sekitar yang harus segera ditangani dengan baik mengingat potensi yang dimiliki serta hasil yang bisa didapatkan dari sektor pariwisata Nepal Van Java.

Pemerintah desa sebagai satuan daerah otonom terkecil memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Desentralisasi telah memberikan legitimasi bagi setiap daerah termasuk wilayah desa untuk memproduksi atau menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, salah satunya di bidang pariwisata (Setyaningrum, dkk, 2022). Asas otonomi daerah ini pun diterapkan oleh Pemerintah Desa Temanggung yang berperan sebagai pemberi arahan serta pembuat kebijakan dalam pengembangan wisata Nepal Van Java. Selain itu, pembentukan BUMDes dan Pokdarwis yang merupakan kelompok usaha berbasis masyarakat juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah desa untuk menciptakan pengelolaan dan pengembangan wisata secara lebih fokus dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibat perkembangan wisata Nepal Van Java yang cukup pesat tersebut, pada tahun 2021 Desa Temanggung ditetapkan sebagai desa

wisata oleh Bupati Magelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Wisata.

Hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak lain menjadi hal yang diperlukan dalam pembangunan serta pengembangan sektor publik (Djabbari, 2021). Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran serta sumber daya yang dimiliki oleh sektor publik sehingga pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam melakukan segala bentuk pembangunan khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Kebijakan publik mengenai hubungan kerja sama sektor publik dengan pihak lain menjadi urgensi bagi setiap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. Kerja sama antar pihak dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan sehingga tercapai satu tujuan yang sama merupakan konsep dari kemitraan. Dalam hal ini, model kemitraan berfokus pada dua pihak, yaitu sektor publik (pemerintah) dan sektor privat sehingga dinamakan *public-private partnership*.

Abbas (2018) mengungkapkan bahwa dalam *public-private partnership* terdapat pengurangan aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam industri tertentu akibat adanya partisipasi sektor privat (swasta) dalam penyediaan layanan masyarakat. Kemitraan ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal dengan sistem pembagian resiko dan manfaat pelaksanaan proyek kerja sama secara merata antara pemerintah dan swasta. Dalam bentuk hubungan ini, pemerintah masih memiliki wewenang di dalam perusahaan atau organisasi swasta yang diajak bekerja sama (Nugroho & Toyib, 2018). Dengan adanya konsep ini, segala bentuk pengembangan dan pembangunan serta

penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan swasta.

Skema *public-private partnership* dapat diimplementasikan dalam segala jenis bidang pembangunan seperti pembangunan infrastruktur jalan yang dibuktikan oleh penelitian Utomo dan Uguy (2022) mengenai proyek pembangunan jalan tol Makassar yang melibatkan kerja sama antara Kementerian PUPR dan PT. Bosowa Margautama; pengelolaan pusat perbelanjaan yang dibuktikan oleh Abbas (2018) mengenai pengelolaan *Suncity Plaza* Sidoarjo yang menerapkan PPP antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco; pengelolaan sampah yang dibuktikan melalui penelitian Setyawati dan Purnaweni (2018) tentang pengelolaan sampah di TPA Jatibarang melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati; pengembangan bidang kesehatan melalui penelitian Prabowo (2018) mengenai Kerja sama antara rumah sakit daerah Jawa Timur dengan pihak swasta seperti PT. Roda Utama dan PT. Bank Jatim untuk meningkatkan *service quality*; pengembangan bidang pariwisata, dan sebagainya. Di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur di segala bidang untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat sehingga skema *public-private partnership* fleksibel untuk diimplementasikan di berbagai bidang tersebut di tengah keterbatasan sektor publik. Hal ini mendorong menguatnya peran swasta di Indonesia yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan negara.

Pariwisata menjadi salah satu bidang yang ikut serta mengimplementasikan skema *public-private partnership* dalam pembangunan dan pengembangannya. Hal

ini karena destinasi wisata sebagai tempat orang berlibur sering membutuhkan pembaruan khususnya dalam hal infrastruktur kaitannya dengan daya tarik dan kenyamanan wisatawan (Djabbari, dkk (2021). Pariwisata merupakan sektor yang menarik dan berpotensi yang saat ini tengah gencar dikembangkan oleh Kemenparekraf sebagai bagian dari bentuk pemulihan ekonomi negara (Kemenparekraf, 2021). Skema *public-private partnership* diimplementasikan sebagai langkah untuk menutupi keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata tersebut.

Public-private partnership diharapkan dapat mendorong pengembangan pariwisata tidak hanya untuk perluasan kapasitas tetapi juga dalam pengembangan kualitas, daya saing serta produktivitas destinasi wisata. Selain itu, hubungan kemitraan juga dianggap sebagai salah satu kunci untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di tengah kelumpuhan pariwisata yang sebelumnya terjadi. Nepal Van Java sebagai destinasi wisata baru yang sedang naik daun penting untuk melakukan jaringan kemitraan dengan harapan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut ditindaklanjuti melalui hubungan kerja sama antara Pemerintah Desa Temanggung dengan salah satu BUMN perbankan di Indonesia, yaitu BRI (Bank Rakyat Indonesia). Dilansir dari surat kabar *online* Jawa Pos (diakses melalui <https://radarkudus.jawapos.com> pada 19 Februari 2023) BRI melalui programnya, yaitu Program Desa Brilian membantu pengembangan pariwisata Nepal Van Java di Dusun Butuh tidak hanya terbatas pada *financial intermediary*, tetapi juga memberikan bantuan berupa pemberdayaan dan pelatihan bagi para pelaku usaha

dan pengelola wisata Nepal Van Java. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pihak swasta cukup penting dalam pengembangan pariwisata Nepal Van Java baik dalam hal sumber daya modal maupun peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata serta taraf hidup masyarakat sekitarnya. Keterlibatan BRI dalam pengembangan wisata Nepal Van Java menjadi jawaban bagi pemerintah desa dan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan untuk mencapai keberhasilan pengembangan wisata Nepal Van Java. Regulasi tentang kerja sama desa dengan swasta berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Kemudian, dasar pelaksanaan melakukan kerja sama tertuang juga dalam RPJMDes Temanggung (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temanggung).

Skema *public-private partnership* telah sukses diterapkan untuk pengembangan pariwisata di dunia seperti penelitian oleh Haddadi dan Khodadadpoor (2015) yang menunjukkan bahwa *public-private partnership* merupakan metode yang paling populer dalam pengembangan pariwisata di Iran yang menghasilkan berbagai inovasi teknologi baru dalam sektor pariwisata. Rusia juga menjadi negara yang menggunakan skema *public-private partnership* dalam proyek pariwisatanya seperti yang tertulis dalam penelitian Zaitseva, et.al. (2017) yang menunjukkan bahwa implementasi PPP sukses untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sehingga terjadi peningkatan arus wisatawan di Rusia.

Beberapa sektor pariwisata di Indonesia pun telah menerapkan skema *public-private partnership* sebagai model untuk pengembangan wisata. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djabbari, dkk (2021) pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja yang menunjukkan bahwa konsep *public private partnership* mengalami keberhasilan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pariwisata di lokasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanta (2017) yang menunjukkan bahwa implementasi model *public-private partnership* telah meningkatkan aktivitas pariwisata kaitannya dengan produktivitas pendapatan di Museum Radya Pustaka Solo. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *public-private partnership* dapat membawa dampak positif bagi pengembangan pariwisata. Hal serupa juga diharapkan terjadi melalui penerapan *public-private partnership* dalam pengembangan pariwisata di Nepal Van Java. Berdasarkan studi terdahulu tersebut maka penelitian mengenai *public-private partnership* relevan dan menarik untuk dilakukan khususnya di Nepal Van Java mengingat destinasi wisata ini merupakan destinasi wisata baru yang masih memerlukan banyak pengembangan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi dunia pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dibentuk beberapa rumusan masalah, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan wisata Nepal Van Java?

- 1.2.2 Apa faktor pendukung pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan wisata Nepal Van Java?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengidentifikasi serta menganalisis proses pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan wisata Nepal Van Java.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor pendukung pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan wisata Nepal Van Java.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1.4.1.1 Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi pembaca mengenai konsep *public-private partnership* serta implementasinya sebagai salah satu strategi pengembangan bidang pariwisata khususnya pada wisata alam Nepal Van Java.
- 1.4.1.2 Dapat menjadi sumber kajian bagi para pembaca dalam bidang administrasi publik

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi dan masukan kepada para *stakeholders* wisata mengenai pentingnya

hubungan kerja sama atau kemitraan publik dan privat dalam upaya pembangunan pariwisata Nepal Van Java.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pariwisata menjadi sektor yang menarik untuk diteliti dengan segala potensi dan kekuatannya yang sangat berdampak bagi sektor perekonomian masyarakat maupun negara. Hubungan kerja sama melalui kemitraan pemerintah dengan swasta menjadi model yang sering dipakai oleh pemerintah dalam kegiatan pembangunan wilayah saat ini khususnya dalam bidang pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa acuan berupa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan salah satu kerangka teori yang bermanfaat bagi peneliti sebagai referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan konsep *public-private partnership* dalam dunia pariwisata sebagai berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Dajbbari, Alwi, dan Tamrin. (2021). Implementasi <i>Public-private partnership</i> dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja.	Untuk mengetahui pelaksanaan <i>Public-private partnership</i> (PPP) dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.	Keadilan, efektivitas, efisiensi, dan tingkah laku menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pariwisata di Toraja Utara. Kerja sama tersebut memberikan efektivitas dalam memperoleh pendapatan retribusi pariwisata serta menghasilkan pengelolaan dan pelayanan pariwisata yang baik. Penggunaan anggaran pun menjadi lebih efisien dengan adanya kerja sama ini.

2.	Pratiwi, Nina Galih, dan Hardi Warsono. (2018). <i>Analisis Public Private Partnership dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.</i>	Untuk menjelaskan proses kemitraan dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan.	Kemitraan merupakan skema yang penting untuk meningkatkan daya tarik wisata Telaga Sarangan, namun kemitraan antara pemerintah dan swasta masih minim dan baru menyentuh tahap <i>information networks</i> . Salah satu bentuk kemitraan yang terjalin, yaitu kerja sama dengan Telkomsel dan PHRI namun belum berjalan secara optimal sehingga hasil yang diterima juga belum signifikan.
3.	Apriliana, Afmi, Rifa Rahmawati, dan Ratnasari Azahari. (2018). <i>Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Wisata Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.</i>	Untuk mengetahui model kemitraan pemerintah dan swasta (<i>public-private partnership</i>) dalam pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu.	Kemitraan pemerintah-swasta dalam pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu dianggap baik. Namun, perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dan OPD terlibat dalam pengembangan kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Peningkatan sumber daya keuangan juga masih perlu ditingkatkan untuk pemeliharaan dan pengembangan serta meningkatkan sumber daya informasi.
4.	Siswanta dan Aries Tri Haryanto. (2017). <i>Public-private partnership dalam Pengelolaan Museum Radya Pustaka Surakarta Kota Surakarta.</i>	Untuk mengungkap model pengembangan berdasarkan kerja sama pemerintah swasta oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta dengan pihak swasta dalam pengelolaan museum Radya Pustaka Surakarta.	Kerja sama kemitraan antara Radyapustaka dengan pemangku kepentingan lebih berdasarkan kepedulian badan lembaga pemerintah terhadap museum cagar budaya. Aspek efisiensi, profesionalisme manajemen dan keseimbangan <i>cost and benefit</i> bukan merupakan faktor yang mendorong terjadinya <i>public-private partnership</i> dalam kasus Radyapustaka ini. Adanya penerapan <i>public-private partnership</i> dalam pengelolaan Radyapustaka dapat terlihat dari adanya fasilitas yang lebih memadai seperti AC, computer, dan <i>scanner</i> yang meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung. Adanya kemitraan ini juga berdampak positif untuk meningkatkan aktivitas pariwisata kaitannya dengan produktivitas pendapatan di Museum Radya Pustaka.
5.	Haryanti, Nik. (2020). <i>Implementasi Public-private partnership sebagai Usaha</i>	Untuk mengetahui keberhasilan <i>public-private partnership</i> dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.	Pengembangan pariwisata di Indonesia lebih difokuskan pada dua hal, yaitu membuat program pengembangan destinasi wisata dan meningkatkan sarana prasarana wisatawan. Dua hal tersebut memerlukan kerja sama pemerintah dan swasta karena membutuhkan sumber daya modal.

	Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Era Global.		Kemudian, untuk mendapatkan keberhasilan PPP dalam pengembangan pariwisata di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu menciptakan pariwisata dan obyek wisata yang berdaya saing, menciptakan pariwisata yang kooperatif, serta menciptakan pariwisata yang memiliki kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
6.	Akbar, Dhani, dan Khairul Ikhsan. (2019). <i>Public-Private Partnership</i> dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove.	Untuk menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata mangrove Kabupaten Bintan serta untuk mengeksplorasi peran swasta dan <i>smart community</i> dalam mengoptimalkan potensi wisata mangrove di daerah pesisir Kab. Bintan.	Jenis kemitraan yang dilakukan adalah berbentuk AOT (<i>Add, Operate, and Transfer</i>) dengan menggunakan prinsip pemberdayaan (<i>empowering</i>) namun memiliki keterbatasan modal, pemasaran, dan teknologi. Untuk mengatasinya, dilakukan pemberdayaan dari pihak swasta sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam pengelolaan wisata mangrove Bintan. <i>Public-private partnership</i> wisata mangrove Bintan dilakukan antara PT. Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dan sudah berjalan baik selama beberapa tahun dengan menggunakan desain <i>collaborative dynamics</i> yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan industri wisata.
7.	Hikmah, D. A., Maulana, A., & Kriswibowo, A. (2020). <i>Public Private People Partnership</i> sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Bagi Kepulauan Bawean.	Untuk merekomendasikan strategi model pengembangan pariwisata melalui <i>public-private people partnership</i> bagi Kepulauan Bawean Kab. Gresik.	Pengembangan pariwisata Kepulauan Bawean menggunakan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang menimbulkan adanya pembagian peran secara merata sehingga dapat memaksimalkan potensi wisata Kepulauan Bawean. Beberapa proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kemitraan, yaitu penciptaan branding wisata secara online dan langsung, monitoring dan evaluasi pencapaian program, serta agenda setting melalui tiga proses mulai dari <i>problem stream, policy stream</i> dan <i>political stream</i> . Konsep <i>public-private partnership</i> ini sangat cocok untuk diterapkan karena melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bermitra sebagai strategi pengembangan pariwisata Kepulauan Bawean.
8.	Mariane, I., Suryadi, S., Firdausijah, T., & Ilhami, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat	Untuk mengetahui kemitraan dalam pengembangan potensi pariwisata Desa Wanasari Kecamatan	<i>Public-private partnership</i> terjalin antara masyarakat pelaku usaha wisata dengan perusahaan Frisian Flag. Pendekatan PPP dapat meningkatkan kerja sama diantara berbagai pihak yang berkepentingan, meningkatkan kemampuan karang taruna sebagai pelaku usaha dan aparat desa sebagai fasilitator arah kebijakan pariwisata untuk mengelola dan

	Melalui <i>Public-private partnership</i> Bagi Peningkatan Pariwisata Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung	Pangalengan, Bandung.	meningkatkan potensi wisata. Melalui peningkatan kemampuan ini, karang taruna sebagai pelaku usaha dapat menggali potensi wisata secara lebih inovatif sehingga dapat menarik investor untuk bekerja sama. Kesepahaman antara pelaku pariwisata yaitu pemerintah desa, karang taruna dan Frisian Flag menjadi satu hal yang penting dalam peningkatan pariwisata Desa Wanasari.
9.	Romadhan, A. A., Pratama, D., & Nurjaman, A. (2021). <i>Public-private partnership</i> dalam Pengembangan Pariwisata di Masa Pandemi di Kota Malang.	Untuk mengetahui perkembangan pariwisata pada masa pandemi di Kota Malang melalui model <i>public-private partnership</i> serta untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala pelaksanaannya.	Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Gojek untuk membantu menghidupkan kembali sektor pariwisata Kota Malang yang kemudian menghasilkan sebuah aplikasi bernama TIC (<i>Tourist Information Centre</i>). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan akses pelayanan pariwisata Kota Malang bagi masyarakat umum. Namun, aplikasi TIC yang dibentuk masih dalam proses sehingga belum terhubung atau terintegrasi dengan aplikasi Gojek.
10.	Kriswibowo, Arimurti, Eka Arum P., dan Khusnul Prasetyo. (2020). <i>Implementation of Public-private partnership in The Development of Tourism in Sumenep District.</i>	Untuk menganalisis implementasi <i>Public-private partnership</i> dalam pengembangan pariwisata khususnya bidang infrastruktur di Kabupaten Sumenep.	Kerja sama dilakukan dengan menggunakan skema <i>Build Own Operation (BOO)</i> yang telah memenuhi sembilan tahapan pelaksanaan PPP. Manfaat yang diperoleh dari implementasi PPP ini adalah mendukung pelaksanaan visit Sumenep dan mendukung pengembangan pariwisata. Kendala yang dihadapi dalam implementasi ini, yaitu rendahnya minat investor dan sulitnya mencari sumber daya manusia yang terampil.
6.	Haddadi, M., dan Khodadadpoor, M. (2015). <i>The Role of Public-private partnership Contracts in Tourism Industry Development.</i>	Untuk menganalisis dan menyelidiki mengenai kontrak kemitraan publik-swasta dalam industri pariwisata di Iran.	Dalam industri pariwisata, konsep <i>public-private partnership</i> di bidang investasi publik dan swasta yang relevan dengan industri pariwisata dapat memberikan konteks yang tepat untuk eksploitasi keahlian dan teknologi baru bidang pariwisata. Pola BOT menjadi salah satu metode kemitraan yang paling populer di bidang pariwisata ini. Metode PPP membutuhkan kontekstualisasi hukum yang melimpah seperti pengesahan UU dengan jaminan pelaksanaan yang efektif dan mempertimbangkan tempat sektor swasta. <i>Public private partnership</i> merupakan metode yang paling populer dalam

			pengembangan pariwisata di Iran yang menghasilkan berbagai inovasi teknologi baru dalam sektor pariwisata.
7.	Cheng, Z., Yang, Z., Gao, H., Tao, H., dan Xu, M. (2018). <i>Does PPP Matter to Sustainable Tourism Development? An Analysis of the Spatial Effect of Tourism PPP Policy in China.</i>	Untuk menganalisis karakteristik pengembangan PPP pariwisata, untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor dampak PPP pariwisata di China.	Terdapat disparitas spasial yang signifikan dalam proyek PPP pariwisata. Meskipun PPP pariwisata merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, faktor keuangan merupakan faktor yang paling penting. PPP berperan sebagai penggerak kebijakan dalam pengembangan pariwisata di China yang mengoreksi ketidaksesuaian spasial antara sumber daya dan faktor pariwisata, menghilangkan ruang hambatan dan mendorong terwujudnya keadilan spasial pembangunan pariwisata. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada perbaikan kebijakan PPP di China tetapi juga berimplikasi pada kebijakan PPP di negara berkembang lainnya.
8.	Herrero Amo, M. D., dan De Stefano, M. C. (2019). <i>Public-Private Partnership as an Innovative Approach for Sustainable Tourism in Guanacaste, Costa Rica.</i>	Untuk menganalisis pentingnya mempromosikan <i>public-private partnership</i> (PPP) sebagai bentuk tata kelola inovatif untuk meningkatkan keberlanjutan model pariwisata di Guanacaste.	PPP untuk pariwisata berkelanjutan di Guanacaste dapat dijalankan jika kepentingan mitra disejajarkan. Kelayakan <i>public-private partnership</i> di Guanacaste sangat bergantung pada keselarasan kepentingan lokal pada mitra, pada kecukupan kemitraan dengan kondisi sosial dan ekonomi dari konteks di mana kemitraan itu harus dilaksanakan dan pada perampasan hasil-hasil dari para mitra.
9.	Rhama, B., dan Ferry, S. (2020). <i>Assessing Public-private partnership in Indonesia Tourism.</i>	Untuk mengetahui keberhasilan <i>public-private partnership</i> dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.	Model <i>public-private partnership</i> dapat dilaksanakan secara efektif dalam program pengembangan destinasi wisata dan program peningkatan infrastruktur wisata. Selain itu, terdapat beberapa target yang harus ditetapkan untuk mencapai keberhasilan PPP dalam pengembangan pariwisata Indonesia, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menciptakan pariwisata yang berdaya saing global maupun nasional 2) Menciptakan pariwisata koperasi yang berfokus pada pelayanan dan infrastruktur destinasi wisata 3) Menciptakan pariwisata yang memiliki karakteristik unik berdasarkan pada kondisi alamnya sehingga memiliki identitas tersendiri.
10.	Zaitseva, N. A., Larionova, A. A.,	Untuk menganalisis dan meringkas	Penggunaan model PPP di sektor pariwisata telah berkembang beberapa tahun terakhir dan sukses

Semenova, L. V., Jidkov, A. S., dan Dashkova, E.V. (2017). <i>Realization of Projects of Public-private partnership in Tourism and Services in the Russian Federation.</i>	pengalaman pelaksanaan proyek-proyek kemitraan publik-swasta di pariwisata dan sektor jasa Federasi Rusia.	dalam implementasi proyek infrastruktur bidang pariwisata seperti pembangunan terminal laut, rekonstruksi bandara, klaster rekreasi dan lainnya. Dukungan pemerintah yang kompeten terhadap bisnis pariwisata akan memastikan peningkatan arus wisatawan dan perkembangan ekonomi kawasan Rusia.
--	--	--

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu (Sumber: Olahan Penulis)

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan salah satu bagian atau disiplin ilmu administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam T. Keban (2008), adalah suatu proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan pegawai publik dengan tujuan untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik. Kedua tokoh tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan istilah yang menunjukkan tentang peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau pembuat kebijakan. Pemerintah selalu aktif dan inisiatif dalam mengatur atau mengambil keputusan sesuai kriteria yang dianutnya, yaitu baik dan penting untuk

masyarakat karena pemerintah memiliki asumsi bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, harus tunduk dan menerima apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah (Keban, 2008:4).

Berdasarkan hal tersebut maka administrasi publik merupakan ilmu yang penting bagi bidang pemerintah kaitannya dengan kebijakan - kebijakan yang dibuat. Administrasi publik bersifat lebih *urgen* atau mendesak dibanding administrasi yang diselenggarakan oleh swasta karena administrasi publik berpengaruh terhadap penyelesaian masyarakat dalam suatu negara. Tujuan administrasi publik adalah untuk memahami secara lebih dalam terkait hubungan antara pemerintah dan publik, meningkatkan tanggung jawab kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengaplikasikan kegiatan-kegiatan manajerial untuk membiasakan diri terhadap kegiatan yang berfifat efektif, efisien, dan rasional.

Model *public-private partnership* dalam pengembangan pariwisata yang menjadi topik dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan kacamata administrasi publik karena pada dasarnya administrasi publik adalah segala hal yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat tak terkecuali pihak swasta didukung oleh adanya formulasi dan implementasi kebijakan yang mengarah pada pembentukan barang dan pelayanan publik. Tujuan administrasi publik berorientasi pada pelayanan dan hal tersebut sejalan dengan tujuan pada model *public-private partnership* yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Orientasi pada pelayanan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kepariwisataan untuk meningkatkan kepuasan pengunjung atau masyarakat. Dengan demikian, teori

administrasi publik sesuai untuk diterapkan dalam topik *public-private partnership* dalam pengembangan pariwisata.

1.5.3 New Public Management (NPM)

New Public Management atau sering disingkat NPM merupakan salah satu paradigma dalam administrasi publik yang berfokus pada pemasukan sektor privat dalam kegiatan publik. Menurut Denhardt & Denhardt dalam Akbar (2015), *New Public Management* (NPM) dilihat sebagai kumpulan ide-ide dan praktik yang berupaya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis ke dalam sektor publik. Gruening dalam Armawinda dan Adnan (2022) berpendapat bahwa salah satu prinsip utama konsep *new public management* adalah penekanan pada kinerja sektor publik. Jadi, *New Public Management* (NPM) merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang berorientasi pada perbaikan administrasi publik menjadi lebih baik melalui pemasukan prinsip privat ke dalam urusan publik.

Pada dasarnya, *new public management* (NPM) memiliki tujuan untuk mengubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga bersifat seperti perusahaan namun tidak berorientasi pada laba melainkan pada penyediaan layanan yang efektif dan efisien bagi publik atau masyarakat (Akbar, 2015). Dengan kata lain, tujuan NPM dalam administrasi publik adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta ekonomisasi sektor publik, meningkatkan kualitas dan kuantitas output sektor publik serta pemerintahan yang berdaya hasil dan berdaya guna. Perubahan secara drastis terjadi akibat masuknya paradigma *new public management*, yaitu perubahan dari manajemen tradisional dengan sifat kaku, birokratis dan hierarkis menjadi sebuah manajemen publik yang lebih fleksibel dan

dapat mengakomodasi pasar (Mardiasmo, 2006). NPM menjadi isu penting dalam reformasi sektor publik. NPM awalnya hanya terjadi di negara-negara maju Eropa, namun perkembangan NPM sangat cepat menjadi sebuah fenomena global dan mendunia sehingga negara-negara berkembang termasuk Indonesia terpengaruh oleh gerakan NPM. Akan tetapi, kondisi dan tingkat pembangunan yang berbeda antar negara menentukan efektivitas dan efisiensi penerapan model *New Public Management* (Fardousi dan Que dalam Armawinda dan Adnan (2022)).

Dalam konsep NPM, pemerintah dipaksa untuk mengadopsi teknik administrasi bisnis maupun nilai-nilai bisnis seperti kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Reformasi dalam sektor publik telah menghendaki pengadopsian keunggulan-keunggulan yang ada di sektor swasta untuk dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip manajemen sektor publik dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas serta memperbaiki akuntabilitas kinerja. *New Public Management* merupakan fenomena global, akan tetapi penerapannya dapat berbeda-beda tergantung *factor localized contingencies* (Mardiasmo, 2006). Pada dasarnya konsep tersebut memiliki satu tujuan, yaitu agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Paradigma NPM dan model *public-private partnership* yang diimplementasikan dalam pengembangan pariwisata memiliki kaitan yang erat karena sama-sama berfokus pada privatisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik bidang pariwisata yang lebih baik. Konsep NPM melahirkan adanya bentuk reformasi manajemen, desentralisasi kekuasaan

dalam berbagai aspek sehingga kewenangan pemerintah cukup terbatas, menjadi berkurang dan terjadi demonopolisasi pemerintahan (Sayidah, dkk, 2015). Fenomena ini sudah mulai terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi di Indonesia melalui adanya kebijakan kerja sama pemerintah dan swasta atau lebih dikenal dengan nama *public-private partnership*. Konsep NPM diadopsi ke dalam bentuk *Public-private partnership* yang menekankan nilai efisiensi, produktivitas, dan kepentingan bersama dalam sektor publik untuk memperbaiki pelayanan dan kinerja pelayanan publik. Dengan kata lain, model *public-private partnership* dalam pengembangan pariwisata Nepal Van Java merupakan bagian dan perwujudan dari paradigma *New Public Management* dalam pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* yang nantinya dibuktikan melalui kepuasan para pengunjung.

1.5.4 Peran

Peran atau yang dalam bahasa Inggris disebut *role* merupakan tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang. Menurut terminologi, peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Biddle dalam Prayudi, dkk (2018) teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya (Agustina, 2009). Berdasarkan definisi para

ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku oleh seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu di masyarakat dan diharapkan oleh banyak orang. Peran tidak hanya dimiliki oleh individu sebagai hak dan kewajiban, melainkan dimiliki pula oleh suatu organisasi baik publik maupun privat.

Aplikasi konsep dalam teori peran menjelaskan adanya keterkaitan antara peran yang melekat dalam diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pekerjaannya salah satunya, yaitu dalam penerapan model *public-private partnership* di lingkungan pemerintahan. *Public-private partnership* menekankan pada kemitraan antara pemerintah dan swasta yang mana kedua pihak memiliki tugas, kewajiban dan peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam topik ini tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan intensitas pariwisata demi kebermanfaatan masyarakat sekitar. Peran akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja serta hasil yang didapatkan sehingga peran menempati satu titik sentral dalam model *public-private partnership*. Peran pemerintah dan swasta yang timbul dalam hubungan kerja sama pengembangan pariwisata Nepal Van Java inilah yang menjadi dasar peneliti menggunakan teori peran sehingga terdapat keterkaitan antara teori peran dengan model *public-private partnership*.

1.5.5 Pariwisata

Menurut *World Trade Organization* (1999), pariwisata merupakan kegiatan perjalanan oleh seseorang ke luar lingkungannya dengan tujuan utama untuk melakukan kegiatan pada tempat yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu

(Supriadi & Roedjinandari, 2017). Definisi pariwisata juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang bersifat sementara dengan tujuan untuk menikmati daya tarik wisata yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka mencari kebahagiaan di lingkungan luar tersebut.

Selain pariwisata, terdapat juga definisi mengenai kawasan pariwisata yang secara umum memiliki arti suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Definisi Kawasan wisata juga dapat disamakan dengan objek wisata. Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, objek wisata, yaitu seluruh kawasan dengan potensi wisata di dalamnya yang menghasilkan daya tarik kemudian dibangun, dikembangkan serta diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa kawasan wisata adalah suatu daerah tertentu yang dijadikan tujuan untuk bepergian dalam rangka mencari kesenangan ataupun memperluas pengetahuan.

Posser dalam Supriadi & Roedjinandari (2017) mengungkapkan bahwa jenis pariwisata dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan hubungan tujuan asal, antara lain:

1. Pariwisata internasional, merupakan pariwisata yang melibatkan pengunjung dari luar negeri menuju tempat wisata di luar negaranya.
2. Pariwisata domestik, merupakan kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh warga negara untuk mengunjungi wisata di negaranya sendiri dalam lingkup daerah kabupaten/kota.
3. Pariwisata nasional, merupakan kegiatan pariwisata oleh warga negara dalam lingkup antar provinsi.

1.5.6 Public Private Partnership

Menurut *World Bank* dalam Ikram (2018) definisi *public-private partnership* (PPP) adalah suatu perjanjian kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan layanan publik dalam jangka waktu yang panjang. Pihak swasta secara signifikan menanggung resiko dan bertanggungjawab dalam pengelolaan program kerja sama. Peters dalam Fitriyah (2016) menjelaskan bahwa *public-private partnership* merupakan pola kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan sektor publik atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya melalui hubungan kerja sama dalam jangka panjang serta terjadi interaksi secara terus menerus antara kedua belah pihak. Selain itu, *public-private partnership* juga dapat dikatakan sebagai perjanjian atau kontrak antara pemerintah dengan sektor swasta yang antara lain; a) sektor swasta mengambilalih fungsi pemerintah selama periode waktu yang ditentukan, b) sektor swasta menerima kompensasi dari pelaksanaan fungsi tersebut baik langsung maupun tidak langsung, c) sektor swasta dibebani timbulnya risiko dari pelaksanaan fungsi tersebut, d) adapun fasilitas publik atau sumber-sumber daya yang lain dapat dialihkan sektor swasta atau dapat

digunakan oleh sektor swasta (Abbas, 2018). Jadi, *public-private partnership* atau sering disingkat PPP merupakan perjanjian kerja sama antara publik (pemerintah) dan swasta dalam jangka waktu tertentu untuk saling memanfaatkan keahlian dan kapabilitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Skema kerja sama pemerintah dengan swasta atau sering disebut *public-private partnership* hadir sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta memperbaiki lambatnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adanya faktor tersebut lah yang menjadikan adanya dorongan serta pertimbangan bagi pemerintah untuk memindahkan atau mengalihkan sebagian urusan pemerintah kepada pihak swasta. Dengan pengalihan urusan tersebut, diharapkan pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap urusan publik yang lebih *urgent* atau darurat. Karakteristik kerja sama *public-private partnership* ini adalah adanya berbagi modal, resiko, tanggung jawab dan hasil. David Levinson dalam Ismowati (2016) mengatakan bahwa “*public-private partnership* yang sukses adalah yang dapat meningkatkan kualitas”. Faktor-faktor tersebut, sekaligus dijadikan nilai positif atau keuntungan dari *public-private partnership*.

Perusahaan atau swasta berorientasi pada benefit atau keuntungan, namun pemerintah pun memiliki aturan pelaksanaan yang tidak memberikan keuntungan terlalu besar kepada swasta. Pemerintah menjadi pihak penengah antara swasta dan masyarakat, dengan aturan bahwa sektor swasta sebagai penanggung jawab proyek kerja sama tetap berada dibawah kontrol pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberikan kontrol terhadap swasta berdasarkan atas apa yang telah ditetapkan

sebelumnya sementara masyarakat memberikan kontrol kepada swasta melalui apa yang dirasakan dan didapatkan atas kinerja swasta yang menangani urusan publik (Fitriyah, 2016). Dengan demikian, pihak swasta tidak akan dapat bertindak semena-mena dalam melaksanakan dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mencapai apa yang dikehendaknya, tetapi swasta akan tetap sesuai dengan aturan terutama kehendak dari masyarakat.

Terdapat beberapa alasan perlunya penerapan *public-private partnership*, antara lain adanya perubahan tata kelola pemerintahan yang menjadi semakin terbuka akibat perkembangan paradigma; adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; adanya keterbatasan sumber daya baik modal maupun sumber daya manusia oleh pihak pemerintah; adanya dukungan dari pengguna jasa; adanya peluang untuk saling berkompetisi bagi para calon mitra swasta; *outcome* pelayanan mudah diukur dan ditetapkan secara rasional; terdapat skema penetapan tarif yang memungkinkan untuk memperoleh kembali biaya pelayanan yang telah dikeluarkan; serta adanya peluang untuk mendorong pertumbuhan dan percepatan perekonomian (Surya, 2016).

Konsep PPP tidak sama dengan privatisasi meskipun keduanya saling berhubungan karena dalam privatisasi terdapat pengurangan peran pemerintah, sedangkan dalam konsep PPP ini baik pemerintah maupun swasta memiliki peran yang sama-sama penting (Ghoni, 2018). Konsep PPP dicirikan oleh pihak swasta yang mengumpulkan dana untuk membangun aset yang dibutuhkan pemerintah serta menyediakan layanan atau fasilitas sebagai imbalan atas aliran pendapatan kontraktual dari pemerintah (Sentanu, 2012). Hal ini sejalan dengan latar belakang

konsep kemitraan publik-swasta, yaitu adanya kesadaran oleh pemerintah yang sadar akan keterbatasan APBN dalam penyediaan pelayanan publik. Djunaedi dalam Sentanu (2012) menyampaikan bahwa konsep *public-private partnership* (PPP) menjadi salah satu skema yang dijadikan harapan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan investor swasta domestik maupun asing untuk bekerja sama dalam penyediaan infrastruktur.

Menurut Leonhardt dalam Safi dan Ekowanti (2022), terdapat beberapa prinsip yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Prinsip tersebut terdiri dari 4 hal, yaitu:

1. Transparansi dan komitmen

Transparansi merupakan keterjaminan bagi setiap pihak atas akses dan kebebasan untuk memperoleh informasi. Komitmen merupakan keterikatan atau bentuk dedikasi suatu pihak untuk melakukan sesuatu.

2. Pengawasan

Merupakan kegiatan pemantauan untuk mengatur pelaksanaan proses kemitraan.

3. Proses Negosiasi

Merupakan proses tawar menawar atau berunding oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan.

4. Kesetaraan peran

Merupakan keadaan yang menunjukkan kedudukan yang sama antar beberapa pihak.

Karakteristik *Public-Private Partnership*

Karakteristik *public-private partnership* menurut Anderson dalam Fitriyah (2016):

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pemerintah dan swasta di dalamnya.
- b. Pemerintah memerlukan kerja sama dari pihak swasta untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.
- c. Terjalannya hubungan yang saling percaya antara pihak-pihak yang bekerja sama, atau memberikan kepercayaan secara terus-menerus.
- d. Kedua belah pihak harus menginvestasikan atau memberikan modal baik berupa materi maupun non-materi seperti dana, fasilitas lahan, dan lainnya.

Pada dasarnya, karakteristik kunci dari *public-private partnership* terletak pada perjanjian kerja sama yang di dalamnya tertuang secara jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, risiko yang ditanggung bersama serta timbal balik atau keuntungan finansial bagi swasta yang setara dengan hasil pencapaian sektor publik.

Bentuk *Public-Private Partnership*

Beberapa variasi dapat dikembangkan dengan konsep *public-private partnership* sesuai dengan kewenangan, kepemilikan serta kesepakatan antara sektor publik dengan privat. Berdasarkan *World Bank Team* dalam Fitriyah (2016), terdapat 5 bentuk PPP, yaitu:

1) Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*)

Model ini menjelaskan bahwa pemerintah memberikan wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dengan timbal balik swasta berupa pembuatan suatu pelayanan dengan harga yang telah disepakati dan sesuai dengan standar performan yang telah ditentukan pemerintah.

2) Kontrak Manajemen (*Management Contract*)

Merupakan perjanjian kontrak antara pemerintah dan swasta yang menyatakan bahwa swasta memiliki hak untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara sebagian atau seluruh fasilitas maupun pelayanan dalam jangka waktu tertentu, biasanya kisaran 2 sampai 5 tahun.

3) Kontrak Sewa (*Lease Contract*)

Merupakan perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan swasta dengan sistem penyewaan yang dilakukan oleh swasta terkait sarana, prasarana, atau peralatan pemerintah yang ada.

4) Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/BOT*)

Merupakan pelibatan sektor swasta dalam hal pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Pihak swasta memberikan bantuan pendanaan yang akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan kualitas beberapa infrastruktur berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

5) Kontrak Konsensus

Dalam bentuk ini, swasta memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur sesuai wewenang yang diberikan oleh pemerintah di area tertentu termasuk dalam kegiatan pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan pengelolaannya.

1.5.7 Faktor Pendukung

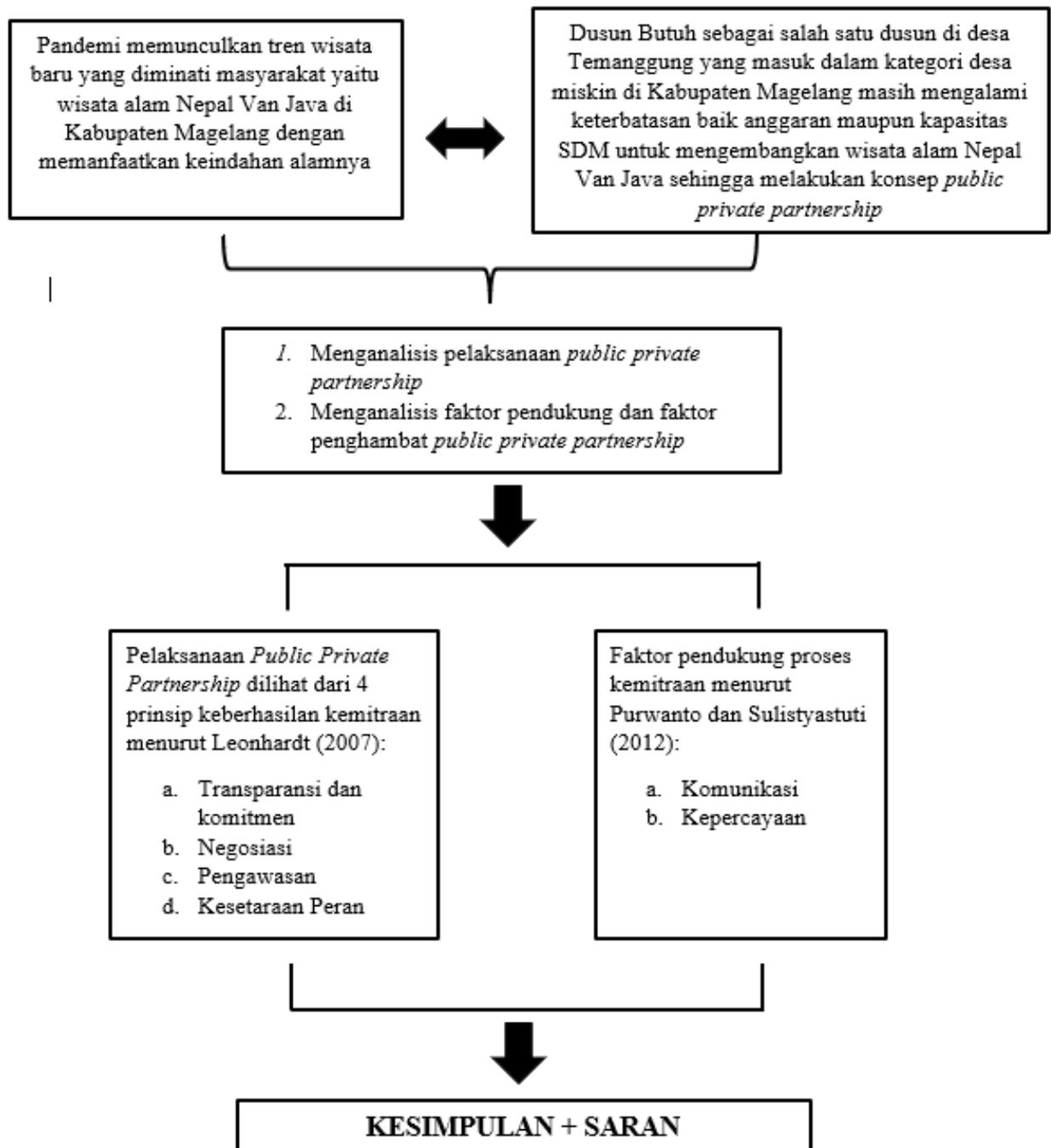
Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan hal yang pasti muncul dalam suatu pelaksanaan program atau kebijakan. Faktor -faktor yang dimaksud adalah faktor yang memberikan kontribusi atau pengaruh dalam pelaksanaan kemitraan baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) (dalam Yuniningsih (2018), terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi antar pihak, terdiri dari:

1. Nilai, merupakan sesuatu yang melekat pada aktor yang dapat berasal dari individu maupun organisasi.
2. Komunikasi, merupakan proses koordinasi dan kerja sama baik secara lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Kepercayaan, merupakan keyakinan satu aktor terhadap aktor lain dalam menjalin hubungan kerja sama.
4. Sumber kebijakan, merupakan regulasi yang menjadi wadah bagi para aktor dalam menjalankan kerja sama.

1.5.8 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian menjadi dasar atau landasan dalam pengembangan konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat industri pariwisata yang sangat potensial maka langkah-langkah dan kebijakan untuk meningkatkan pariwisata harus dilakukan secara tepat dan akurat khususnya untuk mengembangkan destinasi-destinasi di era *new normal* yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat. Dianalisis menggunakan konsep administrasi publik dan paradigma *new public management* yang kemudian diperoleh model *public-private partnership* sebagai kerangka utama dalam penelitian, yaitu model yang diimplementasikan dengan cara melakukan hubungan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan area pariwisata di Nepal Van Java, Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Pemerintah dan swasta saling bekerja sama meskipun memiliki kepentingan yang berbeda, pemerintah dengan tujuan pelayanan pariwisata yang lebih baik, sedangkan swasta dengan tujuan profit atau laba. Akan tetapi, fokus utama keduanya tetap sama, yaitu pada proyek pengembangan pariwisata Nepal Van Java. Skema *public-private partnership* ini diterapkan oleh pemerintah karena melihat kemampuan swasta yang lebih mumpuni untuk melakukan pengembangan khususnya dalam bidang sumber daya modal dan sumber daya manusia sehingga pengembangan pariwisata Nepal Van Java dapat terlaksana dengan optimal dan berkorelasi positif dengan peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian

tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini:



Gambar 1. 3 Bagan Kerangka Pikir Penelitian (Sumber: Olahan Penulis)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Konsep operasional dapat dikatakan sebagai upaya menerjemahkan konsep atau sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkret. Operasionalisasi konsep terdiri dari dua poin penting, yaitu definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep merupakan abstraksi yang diungkapkan dalam bentuk verbal atau kata-kata dalam rangka mempermudah peneliti untuk memahami konsep yang digunakan dalam penelitiannya, sedangkan definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada pengukuran variabel yang biasanya dilihat melalui indikator-indikator yang mempengaruhi.

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini terdiri dari 2 konsep, yaitu

1. Fenomena 1: Pelaksanaan *Public-Private Partnership*

Pelaksanaan *public-private partnership* adalah proses penerapan dan keberlangsungan perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan *public-private partnership* akan dilihat berdasarkan empat ukuran keberhasilan kemitraan menurut Leonhardt dalam Safi dan Ekowanti (2022) yang terdiri dari:

1) Transparansi dan Komitmen

Pelaksanaan *public-private partnership* harus bersifat transparan, artinya seluruh pihak yang terlibat memiliki kebebasan akses terhadap berbagai informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan serta tujuan

yang hendak dicapai oleh pihak yang bekerja sama tersebut untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi yang dapat merugikan proyek kemitraan. Transparansi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu pengetahuan masing-masing pihak akan maksud dan tujuan *public-private partnership*, pengetahuan masing-masing pihak akan manfaat dan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan *public-private partnership*, keterbukaan informasi antar pihak, serta keterbukaan pengelolaan keuangan diantara kedua pihak.

Komitmen juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan *public-private partnership*. Komitmen merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab oleh seluruh pihak dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Pentingnya komitmen antar pihak serta bentuk komitmen yang dilakukan menjadi rincian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2) Proses Negosiasi

Merupakan kegiatan berunding atau musyawarah di antara berbagai pihak dalam rangka menyatukan berbagai pemikiran menjadi satu tujuan dan kesepakatan yang sama terkait dengan *public-private partnership*.

3) Pengawasan

Merupakan tindakan pengamatan dan pemantauan yang dilakukan saat proses pelaksanaan *public-private partnership* dengan tujuan untuk

mengarahkan dan mengatur pelaksanaan agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan menjadi salah satu indikator yang menimbulkan efisiensi dalam pelaksanaan *public-private partnership*. Proses keberjalanan pengawasan dalam pelaksanaan *public-private partnership* dapat diketahui melalui berbagai tahapan proses *public-private partnership*, aktor – aktor yang terlibat dalam proses pengawasan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor tersebut.

4) Kesetaraan Peran

Merupakan kesamaan kedudukan serta hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *public-private partnership*. Kesetaraan peran timbul dari kesepakatan bersama yang telah dibentuk melalui proses negosiasi sebelumnya. Pembagian keuntungan dan pembagian tugas, serta pengambilan keputusan dalam proyek pengembangan pariwisata menjadi indikator kesetaraan peran yang akan dibahas.

2. Fenomena 2: Faktor Pendukung

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang timbul baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap keberjalanan *public-private partnership*. Faktor pendukung memberi pengaruh dan kontribusi yang positif terhadap *public-private partnership* sehingga perlu dipertahankan.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis faktor pendukung pelaksanaan *public-private partnership* di Wisata Alam Nepal Van Java, peneliti berpedoman pada tulisan Purwanto dan Sulistyawati (dalam Yuniningsih, 2018), yang terdiri dari:

1) Komunikasi

Merupakan proses interaksi dan penyampaian informasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan baik secara verbal maupun non-verbal dalam rangka mewujudkan tujuan, yaitu pelaksanaan *public-private partnership* secara optimal. Seberapa intens komunikasi yang terjalin serta media yang digunakan dalam proses komunikasi menjadi gejala yang akan diamati di lapangan.

2) Kepercayaan

Merupakan keyakinan oleh satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan kapasitas dan perilaku dengan harapan pihak tersebut dapat memberikan keuntungan. Proses pelaksanaan kemitraan melibatkan beberapa pihak dengan berbagai macam peran dan tujuan yang berbeda sehingga kepercayaan sangat dibutuhkan agar hubungan antar aktor tetap dapat terjalin secara harmonis dan mempermudah pelaksanaan proyek *public-private partnership*.

1.7 Argumen Penelitian

Pembangunan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Perubahan paradigma dalam konteks pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan melalui pembentukan daerah otonom sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi daerah. Keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, dan jaringan yang dimiliki sektor publik menjadi permasalahan utama tertundanya pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, dilakukanlah hubungan kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk investasi melalui model *public-private partnership* (PPP) untuk menutupi kekurangan anggaran serta sumber daya sektor publik sehingga pengembangan pariwisata dalam bentuk pengembangan infrastruktur maupun pengembangan kapasitas sumber daya pengelola dapat terlaksana.

Public-private partnership merupakan bentuk perwujudan perubahan paradigma administrasi publik menuju NPM (*New Public Management*) yang memberikan ruang bagi swasta untuk ikut serta dalam peningkatan pelayanan publik. Bidang pariwisata sebagai bidang unggulan negara Indonesia pun tak luput dari implementasi model *public-private partnership*. Setelah masa pandemi atau memasuki era *new normal*, terdapat kelonggaran kebijakan pembatasan sosial sehingga masyarakat mulai mencari alternatif solusi berwisata baru setelah mengalami kebosanan yang cukup lama akibat kebijakan tersebut. Hal ini menjadi momentum yang tepat bagi dunia pariwisata untuk kembali menghidupkan eksistensinya.

Destinasi wisata baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, salah satunya wisata alam yang menawarkan keindahan pemandangan untuk menghilangkan kepenatan. Nepal Van Java

menjadi salah satu jawaban bagi masyarakat untuk menghadirkan destinasi wisata baru yang unik dan sesuai kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang sosial media. Namun, dalam pengembangan wisata kemungkinan terjadi hal-hal yang menyebabkan kendala seperti terbatasnya sumber daya modal dan sumber daya manusia sehingga diperlukan skema untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya melalui penerapan *public-private partnership*. Keterlibatan sektor swasta yang semakin aktif dan kompleks disertai peran, fungsi, dan kepentingan masing-masing pihak dalam pengembangan pariwisata Nepal Van Java diharapkan memberikan dampak positif bagi pariwisata Nepal Van Java yang diharapkan berpengaruh pula terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Anggara, 2015). Metode menjadi aspek yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data. Beberapa hal yang terdapat di dalam metodologi penelitian antara lain:

1.8.1 Tipe Penelitian

Sebuah penelitian sangat memerlukan tipe penelitian di dalamnya sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar dalam penelitian tersebut didapatkan data dan informasi yang paling akurat sebagai dasar analisis penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap, menganalisis secara mendalam, serta menggambarkan realitas yang

memiliki kompleksitas tinggi terkait permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi karena tidak terdapat hipotesis di dalam penelitian kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu penelitian namun tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang luas atau dengan kata lain memiliki batasan hanya untuk mendeskripsikan.

Peneliti memilih tipe deskriptif kualitatif karena dinilai lebih sesuai dengan permasalahan, yaitu dapat menghasilkan data berbentuk deskripsi yang lebih rinci beserta gambaran yang lebih mendalam berkaitan dengan kondisi pariwisata Nepal Van Java, hubungan kerja sama atau kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat kaitannya dengan pengembangan pariwisata Nepal Van Java, peran masing-masing pihak yang bersangkutan serta pengaruh ataupun wujud nyata adanya hubungan *public-private partnership* terhadap peningkatan dan perkembangan pariwisata Nepal Van Java. Kesesuaian ini timbul karena pada dasarnya penelitian kualitatif memang digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lainnya. Selain itu juga karena dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif lebih banyak proses melacak tanpa menggunakan angka sehingga data dan informasi hasil penelitian yang dihasilkan akan lebih kompleks. Dalam penelitian ini, faktor penelitian tidak dapat dikuantitatifkan sehingga indikator yang muncul dalam penelitian ini tidak dapat dijelaskan dan digambarkan dalam bentuk angka tetapi dengan persepsi, pendapat, anggapan, argumen, dan sebagainya.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat peneliti akan menangkap keadaan secara nyata dari objek yang diteliti dan diamati untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai kelengkapan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Wisata Alam Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Peneliti memilih lokasi ini sebagai situs penelitian dilatarbelakangi oleh potensi pariwisata yang sangat luar biasa berupa wisata alam dan wisata budaya yang dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun nasional. Nepal Van Java sebagai destinasi wisata baru yang sedang naik daun namun belum mendapat pengelolaan secara maksimal oleh pemerintah desa karena berbagai keterbatasan sumber daya kemudian mendatangkan ketertarikan beberapa pihak swasta untuk bekerja sama dan memberikan bantuan dalam pengembangan wisata Nepal Van Java. Selain itu, peneliti juga tertarik karena Dusun Butuh yang dahulunya merupakan desa miskin kini mampu menghadirkan wisata alam yang sangat potensial serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Hal tersebut yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk meneliti pengembangan pariwisata Nepal Van Java.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam model *public-private partnership* pengembangan pariwisata Nepal Van Java yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa Temanggung melalui Kepala Dusun Butuh.
- b. BRI Kantor Cabang Magelang melalui Manager Bisnis Mikro dan Staff Sarana Penunjang Operasional BRI.

- c. Masyarakat sekitar wisata Nepal Van Java.

1.8.4 Jenis Data

Data merupakan bagian yang paling penting dari penelitian karena dengan data tersebut peneliti dapat menghasilkan penelitian yang akurat serta peneliti dapat mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan. Jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- i. Data Kualitatif

Merupakan data yang berbentuk verbal atau tulisan yang dapat dihasilkan melalui wawancara secara langsung.

- ii. Data Kuantitatif

Merupakan data atau informasi yang didapatkan berupa angka atau nonverbal dan dapat diukur secara langsung sehingga pemrosesan data kuantitatif menggunakan rumus matematika ataupun konsep statistik. Data kuantitatif adalah berupa analisis data sekunder yang sudah tersedia melalui berbagai sumber.

Penelitian ini lebih memfokuskan penggunaan data kualitatif yang dihasilkan melalui wawancara kepada subjek penelitian serta observasi langsung ke lapangan. Data kualitatif yang dihasilkan dari penelitian ini yang menjadi pokok data adalah berupa kata-kata karena sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, yaitu penyelesaian permasalahan penelitian secara rinci.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data merupakan hal mendasar yang wajib diketahui oleh peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian karena dapat berpengaruh terhadap kualitas dan keabsahan data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 2 jenis, yaitu:

A) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Informasi melalui wawancara dengan Pemerintah Desa Temanggung
- 2) Informasi melalui wawancara dengan Staff dan Manager BRI KC Magelang
- 3) Informasi melalui pengamatan dan interaksi terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata Nepal Van Java
- 4) Informasi melalui observasi tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pariwisata, yaitu di Desa Wisata Nepal Van Java.

B) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang berfungsi sebagai penunjang data primer. Data sekunder dapat diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung. Sumber data sekunder tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, tetapi harus melalui orang lain dan dokumen terlebih dahulu (Sugiyono, 2017). Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui *literature* dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi konsep *public-private partnership* khususnya di bidang pariwisata. Data penunjang lainnya adalah berupa data kunjungan wisatawan Nepal Van Java, catatan keuangan pembangunan wisata Nepal Van Java, serta data penjualan tiket Nepal Van Java selama beberapa tahun terakhir. Beberapa arsip foto dan dokumentasi kegiatan kerja sama pemerintah desa dan BRI yang dimiliki oleh narasumber turut menjadi data sekunder untuk mendukung keabsahan penelitian ini. Sebelumnya, peneliti harus melakukan permohonan ijin terlebih dahulu untuk meminjam berbagai data tersebut kepada pengelola wisata yang bersangkutan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data sehingga teknik pengumpulan data menjadi salah satu tahap yang penting dan strategis dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data dari narasumber memerlukan banyak waktu dan

tidak dapat diperoleh secara instan sehingga teknik pengumpulan data menjadi proses kunci dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu obyek dengan memusatkan perhatian menggunakan seluruh alat indera guna menyempurnakan penelitian agar mendapatkan data dan hasil yang maksimal. Berdasarkan keterlibatan pengamat terhadap kegiatan subjek yang diamati, observasi dibedakan menjadi dua macam (Soehartono, 2008: 70), yaitu:

1. *Participant Observation*, yaitu partisipan dan pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati.
2. *Nonparticipant Observation*, yaitu pengamat atau peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di wisata alam Nepal Van Java. Observasi yang dilakukan peneliti bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti hanya bersifat sebagai pengamat tanpa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian karena situasi dan peran yang tidak memungkinkan untuk ikut serta terlibat di dalamnya. Observasi

yang dilakukan oleh peneliti berfokus untuk menganalisis dan mempelajari kondisi pariwisata Nepal Van Java, mengamati perilaku wisatawan, masyarakat dan pengelola wisata apakah mengalami perubahan dibanding sebelumnya atau tidak. Hasil pengamatan di lapangan dicatat oleh peneliti sebagai bentuk data primer penelitian.

2) Wawancara

Menurut Stewart dan Cash, wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau *sharing* aturan, tanggung jawab, kepercayaan, motif, dan informasi (dalam Herdiansyah, 2015). Ketika peneliti ingin mengetahui hal-hal terkait penelitian dari responden secara mendalam maka teknik pengumpulan data melalui wawancara menjadi teknik yang tepat. Selain itu, wawancara juga dapat menjadi pilihan apabila ingin melakukan studi pendahuluan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan peneliti tidak harus selalu dilakukan secara bertemu tatap muka tetapi dapat juga melalui media tertentu seperti telepon, *video conference* ataupun *chatting* melalui internet.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang bersifat *in-depth interview* atau wawancara secara mendalam terhadap para informan dengan menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur yang artinya, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan terkait pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan swasta melalui model *public-private partnership* serta perannya dalam pengembangan pariwisata

Nepal Van Java. Peneliti masih dapat mengajukan pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan jawaban informan walaupun pertanyaan tidak masuk ke dalam rancangan daftar pertanyaan. Wawancara dengan teknik semi-terstruktur dipilih oleh peneliti karena dengan teknik tersebut wawancara akan berjalan secara lebih dinamis dan informasi maupun data yang didapatkan menjadi lebih rinci dan mendalam.

Informan merupakan kunci utama dalam penelitian sebagai sumber perolehan data penelitian yang dibutuhkan. Identitas informan sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan rasional untuk memperoleh data penelitian yang tepat, akurat dan sesuai kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan informan yang secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan Desa Wisata Nepal Van Java. Topik penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah topik *public-private partnership* yang melibatkan 2 pihak, yaitu pemerintah sebagai sektor publik dan swasta sebagai sektor privat maka informan yang dijadikan sumber penelitian pun terdiri dari 2 pihak. Kedua pihak tersebut terdiri dari Pemerintah Desa Temanggung dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Magelang. Informan utama dalam subjek penelitian ini adalah Bapak Lilik Setiawan selaku Kepala Dusun Butuh sekaligus penanggung jawab Pokdarwis Nepal Van Java, sedangkan informan triangulasi atau informan yang berfungsi untuk melakukan *cross check* informasi dari informan utama berasal dari pihak swasta, yaitu Bank Rakyat Indonesia yang diwakili oleh Bapak

Suparnu selaku Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Magelang dan Bapak Marsudi selaku Staff Sarana Penunjang Operasional BRI Kantor Cabang Magelang.

Adapun nama informan penelitian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Lilik Setiawan	Kepala Dusun	Pemerintah Desa Temanggung
2.	Suparnu	Manager Bisnis Mikro	BRI KC Magelang
3.	Marsudi	Staff Sarana Penunjang Operasional	BRI KC Magelang

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data yang didapatkan oleh penulis. Dokumentasi yang dapat digunakan berasal dari catatan penting dari lembaga, organisasi ataupun perseorangan dengan syarat merupakan catatan yang terpercaya. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa foto atau gambar keadaan pariwisata Nepal Van Java sebelum dilakukan berbagai pengembangan serta data kunjungan wisatawan selama beberapa tahun terakhir.

4) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data khususnya data sekunder dengan melakukan tinjauan ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, penelitian terdahulu serta referensi tertulis lain yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang administrasi publik, manajemen publik, konsep *public-private partnership*, serta mengenai pariwisata. Dapat dikatakan bahwa studi pustaka lebih berfokus pada pencarian teori penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2016), analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data hasil wawancara, observasi, dokumentasi maupun studi pustaka agar berbentuk sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang penting untuk dikaji serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yang terdiri dari:

- 1) Pengumpulan data, yaitu proses mencari, menemukan dan mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Strategi pengumpulan data harus tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan untuk menemukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang cukup lama sehingga akan menghasilkan data yang bervariasi.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap baik secara langsung ke lapangan maupun tidak langsung. Tahap pertama dilakukan dengan observasi dan wawancara ke lokasi penelitian, yaitu wisata alam Nepal Van Java dilanjutkan dengan menganalisis dokumentasi berupa foto dan data yang tersedia. Pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan melalui studi pustaka beberapa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kolaborasi *stakeholders* pariwisata.

- 2) Reduksi data, merupakan proses untuk merangkum, menemukan serta memilih dan memfokuskan data pada hal yang pokok dan penting sesuai tema dan pola yang digunakan. Dengan demikian, data yang akan direduksi memberikan gambaran secara lebih rinci dan jelas serta bersifat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017). Reduksi data sangat diperlukan dalam penelitian ketika jumlah data yang dihasilkan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data dilakukan sejak peneliti memfokuskan lokasi dan wilayah penelitian.
- 3) Penyajian data, merupakan penggambaran dan penyusunan informasi yang telah dihasilkan yang kemudian memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif,

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lainnya. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif termasuk juga dalam penelitian ini. Dalam proses ini pencarian data masih dapat terus dilakukan dan belum berakhir.

Proses data *display* hasil wawancara dilakukan dengan cara menyusun petikan-petikan wawancara untuk tiap ide yang ada di pola atau tema yang sama dimaksudkan untuk memberikan gambaran alamiah penelitian yang bersumber dari wawancara asli dengan informan.

- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu langkah atau usaha untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat maka sebuah kesimpulan perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar penafsiran terhadap data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat kuat dan tidak mudah dipatahkan oleh pendapat lain.

1.8.8 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data menjadi tahap yang penting untuk menentukan dan memverifikasi apakah data yang dihasilkan selama penelitian di lapangan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya sekaligus menjadi penguji apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kredibilitas menggunakan cara meningkatkan ketekunan pengamatan. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian telah dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah penelitian ilmiah. Meningkatkan ketekunan pengamatan merupakan salah satu cara dalam uji kredibilitas yang mengharuskan peneliti untuk mau dan mampu dalam menelusuri fenomena sosial secara lebih mendalam sehingga terkumpul data dan informasi yang sesungguhnya dalam konteks situasi sosial yang sebenarnya (Muri, 2014). Selain itu, dalam cara ini, peneliti harus selalu menghindarkan diri dari subjektivitas. Cara peneliti menghindari subjektivitas adalah dengan menggunakan lebih dari satu informan dalam proses pengumpulan data sehingga peneliti dapat membandingkan jawaban wawancara, yaitu membandingkan jawaban antara informan pihak BRI serta informan pihak desa. Selain itu, peneliti juga melakukan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh melalui observasi di sekitar lokasi penelitian seperti melihat berbagai hasil pembangunan, aktivitas masyarakat, dan aktivitas wisatawan. Subjektivitas juga dapat dihindari oleh peneliti melalui adanya dukungan beberapa data sekunder seperti gambar dokumentasi serta data-data laporan. Posisi peneliti adalah sebagai instrumen penelitian yang memiliki kedudukan setara dengan informan yang diteliti.